

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan wilayah yang terintegrasi baik dari segi hierarki spasial, aktor maupun kebijakan sejalan dengan keinginan untuk mengatasi kendala dalam mewujudkan *good governance*. *Good governance* atau pemerintahan yang baik adalah manajemen kompeten yang dijalankan oleh suatu negara dengan cara yang transparan, akuntabel, adil dan responsif terhadap kebutuhan rakyatnya (Ray, 2013 dalam Chong, 2016). Kendala yang seringkali dihadapi adalah birokrasi yang buruk sebagai hasil rentetan dari buruknya akuntabilitas (Novianti, 2014). Menurut UNDP dalam Soleh dan Rochmansjah (2010), buruknya akuntabilitas dapat diatasi melalui 3 (tiga) aspek yaitu politik (*political governance*), ekonomi (*economic governance*) dan administrasi (*administrative governance*). Dilihat dari aspek tersebut, integrasi pembangunan dapat dilakukan dengan: (1) integrasi dari segi sinkronisasi antar kebijakan melalui *political governance* (proses politik untuk menghasilkan kebijakan) dan *economic governance* (proses pembuatan kebijakan di bidang ekonomi); serta (2) integrasi dari aspek hierarki spasial dan aktor melalui *administrative governance* (sistem implementasi pelaksanaan kebijakan berupa program/kegiatan pembangunan).

Integrasi pembangunan juga diperlukan dalam upaya pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan wilayah merupakan strategi dalam memanfaatkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal menjadi potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian wilayah (Dewi, 2014). Dalam perjalanan proses menentukan potensi serta strategi yang digunakan untuk pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, perumusannya tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah pada masing-masing Kabupaten/Kota melainkan terpadu dengan perencanaan yang kolaboratif antara Provinsi Jawa Tengah dengan 35 Kabupaten/Kota nya. Melalui integrasi pembangunan, program beserta kegiatan dapat disusun sesuai dengan strategi yang tepat bagi pengembangan

wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya tepat namun juga dapat diimplementasikan dengan baik melalui integrasi antar kebijakan, serta dapat memenuhi harapan, baik harapan Pemerintah Provinsi maupun juga harapan masyarakat di masing-masing Kabupaten/Kota melalui integrasi hierarki spasial.

Integrasi pembangunan dari segi sinkronisasi antar kebijakan melalui *political governance* dan *economic governance* akan lebih baik apabila disertai dengan adanya partisipasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan salah satu ciri dari keberhasilan praktek pemerintahan yang baik menurut UNDP dalam Soleh dan Rochmansjah (2010). Selain itu, penyediaan ruang bagi partisipasi masyarakat yang semakin besar akan menciptakan perubahan yang semakin besar pula untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Huntington, 1968 dalam Chalid, 2005). Sementara itu, integrasi dari aspek hierarki spasial dan aktor melalui *administrative governance* memiliki tantangan yang berbeda apabila dipandang dari penerapan otonomi daerah yaitu bagaimana menjaga pembangunan yang terintegrasi antara tingkat spasial yang lebih tinggi dengan tingkat spasial yang lebih rendah (Pusat dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Provinsi dengan Kabupaten/Kota nya), mengingat saat ini terdapat 514 Kabupaten/Kota (BPS, 2015). Artinya, terdapat 514 Kepala Daerah dengan masing-masing visi dan misi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan daerah yang berbeda-beda, sehingga pembangunan antara tingkat spasial yang lebih tinggi dengan tingkat spasial yang lebih rendah tidak hanya perlu terintegrasi dalam mencapai target-target pembangunan bersama namun juga terintegrasi dengan kebutuhan daerah.

Salah satu alat yang dapat digunakan dalam menjawab tantangan integrasi pembangunan dalam penerapan otonomi daerah berupa perbedaan hierarki spasial, khususnya antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota yaitu melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Menurut Chalid (2005), otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan yang diberikan memiliki dua makna esensial yakni: (1) kemandirian daerah; serta (2) tanggung jawab daerah yang besar (Sutrisna, 2013). Pendapat Saragih, 2003 dalam Adi, 2012 menyebutkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah merupakan akses menuju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan

upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kemandirian daerah. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta apabila terintegrasi dengan baik, sekaligus dapat membantu mencapai target-target pembangunan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta merealisasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagai alat integrasi pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota telah diimplementasikan oleh berbagai Provinsi di Indonesia. Integrasi yang paling sederhana dari pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota tersebut adalah dalam hal pencapaian target pembangunan bersama, seperti halnya Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dari alokasi anggaran APBD Provinsi Banten TA 2015 yang dimaksudkan untuk pembangunan desa/lingkungan terpadu pada kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Banten (BPK, 2015). Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagai alat integrasi pembangunan tampak pula pada dasar pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari APBD Provinsi Riau yaitu untuk mendukung kebijakan strategis Provinsi dan/atau program Nasional sesuai urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dapat dijadikan sebagai sarana perwujudan pembangunan yang terintegrasi dalam hal pencapaian target pembangunan sekaligus terhadap kebutuhan daerah tampaknya dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Usulan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan kegiatan kewenangan Kabupaten/Kota yang menunjang program-program strategis pembangunan Provinsi dan Nasional dengan tujuan diantaranya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan serta mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat.

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sudah dianggarkan sejak era reformasi meskipun dengan nomenklatur berbeda yaitu 2P.0.A yang merupakan bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi (Pemerintah Daerah Tingkat I) bagi Pemerintah Daerah di bawahnya (Pemerintah

Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya). Pengelolaan keuangan daerah pada era tersebut dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Setelah era reformasi atau setelah ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, nomenklatur Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota mulai digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian Pembangunan Daerah. Pengalokasian bantuan tersebut diamanatkan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun pada pertengahan Tahun Anggaran sebelumnya, selanjutnya dipedomani melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pedoman Umum Kegiatan dan mulai Tahun Anggaran 2013 dipayungi oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

Substansi kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dari APBD Provinsi Jawa Tengah dapat berupa bantuan sarana prasarana, bantuan pendidikan serta kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya selain sarana prasarana dan bantuan pendidikan merupakan kegiatan yang selalu dialokasikan setiap tahun dengan besaran anggaran yang rata-rata sama, yaitu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui Penguatan FEDEP; Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD); Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Muria; Bantuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota; Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota; serta Bantuan Dukungan Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa. Sementara itu, teknis mengenai Bantuan Pendidikan telah diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan nilai per paket kegiatan Bantuan Pendidikan telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Berbeda dengan hal tersebut, kegiatan beserta besaran alokasi anggaran bantuan sarana prasarana lebih bervariasi. Hal tersebut disebabkan karena adanya pertimbangan proporsionalitas, usulan yang disampaikan dalam rangkaian Musrenbangprov, usulan strategis pasca Musrenbangprov serta usulan tindak lanjut hasil kunjungan kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Perumusan Masalah

Pengelolaan keuangan beserta pendanaannya merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam pendanaan pelaksanaan rencana pengembangan daerah (Susanto, 2015). Menyikapi hal tersebut, Soewardi (2015) berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk meningkatkan sisi pendapatan berupa perluasan jenis pajak daerah dan peningkatan fasilitas umum atau mengumpulkan sumber-sumber pendanaan yang lain. Namun demikian, kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan sisi pendapatan tidak selalu sebanding lurus dengan kebutuhan anggaran untuk mengatasi permasalahan atau menjalankan upaya-upaya pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian halnya dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi salah satu permasalahan dalam membiayai program-program strategis daerah.

Selain untuk mencapai target daerahnya sendiri, Pemerintah Kabupaten/Kota juga turut dituntut secara tidak langsung untuk mendukung pemenuhan target-target yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah ataupun Pemerintah Pusat. Integrasi pembangunan untuk mendukung pencapaian target-target Provinsi tersebut telah diupayakan melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, integrasi pembangunan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/Kota-nya melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota terbatas oleh kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga pengalokasiannya harus mempertimbangkan kegiatan prioritas yang ditentukan melalui proses Musrenbang.

Penentuan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota telah dilakukan melalui proses Musrenbang, namun dijumpainya kegiatan yang tidak dilaksanakan serta tidak dicairkan anggarannya oleh Kabupaten/Kota mengindikasikan belum adanya sinkronisasi antara kegiatan prioritas yang ditetapkan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota. Hal tersebut tidak terlepas dari beragamnya sumber-sumber usulan kegiatan yang lain

yaitu berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota pasca Musrenbangprov, DPRD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil kunker serta Gubernur Jawa Tengah berdasarkan hasil roadshow. Kesemua sumber usulan tersebut berakar dari aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara langsung dalam kunker dan roadshow ataupun disampaikan melalui rangkaian Musrenbang. Namun demikian, tidak semua aspirasi masyarakat merupakan kegiatan prioritas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan strategis di daerah. Dengan demikian tentunya beragam aspirasi tersebut perlu diselaraskan dengan kebutuhan dalam dokumen perencanaan sebagai acuan dasar rencana program/kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan daerah.

Dari 35 Kabupaten/Kota penerima bantuan, hampir setiap akhir tahun anggaran tidak dapat mencapai target realisasi fisik sebesar 100% utamanya pada bidang sarana prasarana. Rendahnya capaian fisik tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga alokasi anggarannya menjadi SiLPA di Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Realisasi Fisik dan Keuangan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember Tahun Anggaran 2011-2015, diketahui bahwa SiLPA Provinsi Tahun Anggaran 2011 sebesar 0,39%; Tahun Anggaran 2012 sebesar 2,59%; Tahun Anggaran 2013 sebesar 2,66%; Tahun Anggaran 2014 sebesar 9,78% sedangkan dari Tahun Anggaran 2015 sebesar 13,84%. Kenaikan trend SiLPA Provinsi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bukan hanya tidak dilaksanakan namun juga anggarannya tidak diambil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari gambaran tersebut, dirumuskan sebuah pertanyaan penelitian yaitu **“Apakah kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana dan prasarana yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota?”**.

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat integrasi pembangunan antara Provinsi Jawa Tengah terhadap

kebutuhan Kabupaten/Kota-nya melalui pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana dan prasarana serta merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang diperoleh untuk diterapkan terhadap integrasi pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2. Sasaran Penelitian

Adapun sasaran dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

- a. Mengidentifikasi kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011-2015 yang selesai dan tidak selesai atau tidak dapat dilaksanakan;
- b. Menganalisis pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011-2015 yang telah dan belum terintegrasi;
- c. Menganalisis kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011-2015 yang sesuai dan tidak sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota;
- d. Menganalisis aspek kesesuaian/ketidaksesuaian integrasi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/Kota melalui proses pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana Tahun Anggaran 2011-2015 serta terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota;
- e. Merumuskan rekomendasi dalam upaya integrasi pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menentukan batasan penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga dapat lebih fokus kepada permasalahan penelitian. Ruang lingkup penelitian meliputi ruang lingkup substansial dan ruang lingkup spasial. Ruang lingkup substansial memberikan batasan mengenai substansi yang akan dikaji, sedangkan ruang lingkup spasial memberikan batasan mengenai lokasi penelitian dilaksanakan.

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial pada penelitian ini adalah kesesuaian antara dua komponen yaitu: (1) kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana Tahun Anggaran 2011-2015 yang telah ditentukan; dibandingkan dengan (2) prioritas kebutuhan daerah yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan di Kabupaten/Kota meliputi RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Kabupaten/Kota dan RKPD Kabupaten/Kota.

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah keseluruhan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat kesesuaian penetapan prioritas kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana dan prasarana di Provinsi Jawa Tengah dengan prioritas kebutuhan wilayah di daerah (Kabupaten/Kota), sehingga selanjutnya dapat dirumuskan sebuah rekomendasi untuk mewujudkan integrasi pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

1.6. Keaslian Penelitian

Kajian mengenai keaslian penelitian diperlukan agar penelitian yang akan dilaksanakan terhindar dari tindak plagiarisme, serta mengetahui posisi penelitian diantara ruang lingkup penelitian terdahulu. Kajian tersebut dilakukan dengan cara mengkaji kelebihan dan kekurangan penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.

Beberapa penelitian mengenai integrasi dalam pelaksanaan pembangunan pernah dilakukan, diantaranya integrasi dalam hal pengalokasian anggaran antara tingkat spasial yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, integrasi dalam pengelolaan sumber daya daerah, hingga integrasi pelaporan realisasi pelaksanaan kegiatan serta perencanaannya (Tabel I.1). Namun demikian, beberapa penelitian terdahulu tersebut dilakukan secara spesifik pada satu tahapan tertentu saja (pengalokasian anggaran saja, pengelolaan saja, pelaporan saja, dan

perencanaannya saja), sehingga belum secara menyeluruh mengkaji mengenai integrasi pembangunan. Dengan demikian, kelebihan dari penelitian ini adalah mengkaji integrasi pembangunan secara menyeluruh sesuai dengan variabel-variabel integrasi pembangunan yang ditemukan mulai dari perencanaan hingga akhir pelaksanaan kegiatan.

TABEL I.1
KEASLIAN PENELITIAN

Nama/ Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
Ladislav Mura dan Jan Buleca et al/ 2014	Identification of Funding of Regional Governments Using Correlation Analysis.	Menganalisis pembangunan daerah yang bersumber dari pembiayaan Uni Eropa.	Metode penelitian kuantitatif dengan alat analisis korelasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat korelasi yang signifikan antara perolehan dana dan kinerja yang baik (di kota Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Prešov, dan Košice); 2. Daerah yang memperoleh dana terbesar adalah Žilina dan Prešov Region sedangkan yang terendah adalah daerah Bratislava.
Dwi Susanto dan Djuminah/ 2015	The Usefulness of Local Government Financial Statements for Regional Development Planning Process (An Empirical Study Against the Head of the District Development Planning Agencies in Java and Madura).	Mengidentifikasi kegunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LGFS) yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.	Metode penelitian kuantitatif dengan alat analisis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis deskriptif; 2. Chi-Square analysis; 3. Mann-Whitney analysis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan REP (Rasio Efisiensi Pendapatan) adalah elemen laporan keuangan dan rasio keuangan yang memiliki tingkat kegunaan tertinggi; 2. Unsur-unsur laporan keuangan dan rasio keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi berbasis kas memiliki tingkat kegunaan yang lebih tinggi daripada yang berbasis sistem akuntansi.
Aliya A. Shugaepova dan Dilyara I. Ravzieva/ 2015	Regional Strategic Priorities Identification Approach.	Mengidentifikasi kebutuhan dalam pendekatan menentukan arah prioritas pembangunan ekonomi regional.	Menggunakan alat analisis multi level.	<p>Beberapa pendekatan yang dibutuhkan untuk menentukan arah prioritas pembangunan ekonomi regional adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran daerah dalam manajemen dan

Nama/ Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
				<p>pengembangan strategis dalam rangka meningkatkan akumulasi potensi;</p> <p>2. Menganalisis portofolio ekspor daerah yang efektif dan mengidentifikasi arah prioritas pembangunan ekonomi;</p> <p>3. Mengembangkan strategi pengembangan regional serta alat penilaian daya saing daerah yang sudah ada, dengan mempelajari program perencanaan sosial ekonomi regional yang berfokus pada prioritas daerah, memperhitungkan lintas industri serta tren lintas daerah.</p>

Sumber: Analisis Penulis, 2016

1.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.3. Latar belakang tersebut mengungkap perlunya mewujudkan *good governance* dalam era pemberlakuan otonomi daerah sehingga memerlukan pembangunan yang terintegrasi. Sementara itu, perumusan masalah yang diangkat adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membiayai program-program strategis daerah dan apabila memungkinkan dibantu oleh Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pun terkendala oleh kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi sehingga pengalokasiannya harus disesuaikan dengan kegiatan prioritas. Namun demikian, pada setiap akhir tahun anggaran ditemukan kegiatan yang tidak selesai atau tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, maka dilakukan serangkaian proses berupa kajian literatur untuk menemukan variabel yang sesuai, teknik analisis hingga kesimpulan dan rekomendasi.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif-positivistik. Menurut Sugiyono (2010) metode kuantitatif merupakan penelitian yang datanya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik sedangkan menurut Bungin (2005), metode positivistik merupakan penelitian yang menggunakan teori atau paradigma teori untuk menemukan masalah penelitian, hipotesis, konsep-konsep, metodologi dan alat-alat analisis data, dengan menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Dalam pandangan positivisme, penelitian berangkat dari suatu realitas/gejala/fenomena pada suatu populasi ataupun sampel tertentu yang representatif yang kemudian dapat teramati dan terukur dengan hubungan gejala yang bersifat sebab-akibat (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini, penelitian berangkat dari fenomena ditemukannya kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah yang tidak selesai atau tidak dapat dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran berkenaan.

1.8.2. Data dan Teknik Pengumpulan Data

1.8.2.1. Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Menurut jenisnya, data sekunder yang digunakan termasuk kedalam internal data yaitu diperoleh dari sumber yang tertulis langsung pada data sekunder selaku instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah.

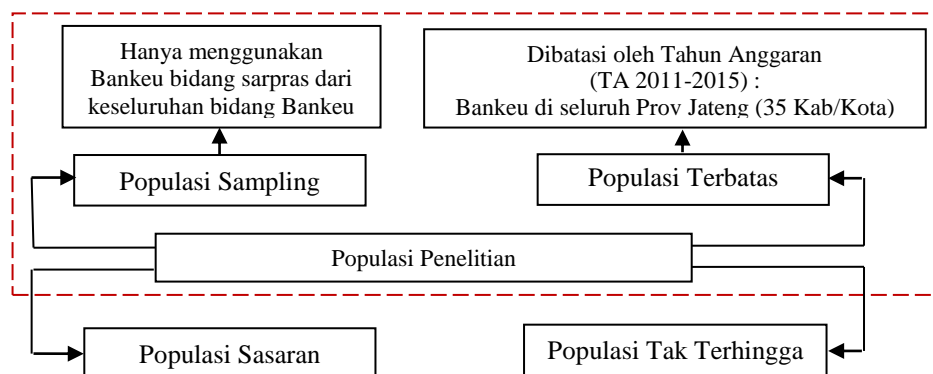
1.8.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara telaah dokumen. Dokumen adalah segala produk dokumen yang dihasilkan oleh manusia (Esterbeg, 2001 dalam Sarosa, 2012 dalam Estu, 2013). Dalam menyelesaikan sasaran-sasaran penelitian, diperlukan dokumen yang berkaitan dengan realisasi kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

bidang sarana prasarana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011-2015 dalam hal alokasi anggaran dan waktu pelaksanaan beserta kebijakan terkaitnya. Selain itu diperlukan pula dokumen yang menunjukkan visi misi Kabupaten/Kota serta prioritas program di Kabupaten/Kota pada Tahun 2011-2015. Dokumen yang akan ditelaah sebagaimana disebutkan dalam tabel kebutuhan data pada Lampiran 1.

1.8.3. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 Kabupaten/Kota. Populasi penelitian adalah keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian (Bungin, 2005). Sesuai dengan sasaran penelitian, populasi penelitian yang digunakan merupakan jenis populasi terbatas yaitu populasi dengan batasan kuantitatif yang jelas (Bungin, 2005). Batasan kuantitatif pada populasi penelitian ini yaitu Tahun Anggaran (2011-2015). Sementara itu berdasarkan lingkupnya, populasi yang digunakan termasuk dalam kategori populasi *sampling* karena hanya sebagian aspek yang diteliti yaitu sarana prasarana dari keseluruhan aspek Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang ada di 35 Kabupaten/Kota.



Sumber: Hasil analisis, 2016

GAMBAR 1.1
POPULASI PENELITIAN YANG DIGUNAKAN

1.8.4. Kebutuhan Data Penelitian

Kebutuhan data sesuai dengan variabel ketidaksesuaian integrasi pembangunan melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota (implementasi kegiatan, kebijakan, alokasi anggaran dan waktu) serta variabel yang mewakili kebutuhan Kabupaten/Kota (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yaitu:

1. Realisasi fisik, keuangan dan pencairan dana hingga Bulan Desember; serta waktu penyelesaian kegiatan, yang diperoleh dari laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember (1 Jan s/d 31 Des 2011) TA 2011, (1 Jan s/d 31 Des 2012) TA 2012, (1 Jan s/d 31 Des 2013) TA 2013, (1 Jan s/d 31 Des 2014) TA 2014 dan (1 Jan s/d 31 Des 2015) TA 2015 berbentuk data ratio.
2. Kebijakan pengalokasian anggaran dan waktu penyelesaian kegiatan; serta jenis kegiatan, yang diperoleh dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah berbentuk data nominal.
3. Alokasi anggaran dan lokasi kegiatan, yang diperoleh dari DPA Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2011-2015 berbentuk data ratio.
4. Visi, misi dan arah pembangunan daerah, yang diperoleh dari RPJPD Kabupaten/Kota berbentuk data nominal.
5. Program pembangunan kepala daerah, yang diperoleh dari RPJMD Kabupaten/Kota berbentuk data nominal.
6. Prioritas pembangunan daerah, yang diperoleh dari RKPD Kabupaten/Kota berbentuk data nominal.

Secara terperinci, kebutuhan data penelitian sesuai dengan variabel dan sasaran penelitian dapat dilihat pada tabel dalam Lampiran 1.

1.8.5. Pengolahan dan Teknik Analisis Data

1.8.5.1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap lanjutan setelah dilakukannya proses pengumpulan data. Proses pengolahan data dilakukan melalui beberapa langkah yaitu: (1) *editing*; (2) *coding*; dan (3) *tabulating*. Dalam proses *editing*, data yang telah diperoleh diperiksa kesesuaiannya dengan data yang diharapkan. Pada

langkah ini, peneliti dibantu oleh instrumen berupa daftar koreksi untuk mempermudah melakukan pemeriksaan ulang.

TABEL I.2
INSTRUMEN DAFTAR KOREKSI DATA

Nomor Kebutuhan Data	Halaman	Poin	Uraian	Catatan Koreksi

Sumber: Hasil analisis, 2016

Setelah data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan, maka data-data tersebut diberi identitas melalui proses *coding*. *Coding* tersebut dilakukan dengan menggunakan lambing atau kode berupa kode huruf untuk kemudian diproses melalui *tabulasi* yaitu memasukkan data-data kedalam tabel agar dapat diatur dan dihitung. *Tabulasi* tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan tabel data (tabel untuk menstrukturkan data) dan tabel kerja (tabel untuk menganalisis data). Instrumen *tabulasi* berupa tabel data yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan Tabel I.3 untuk implementasi kegiatan.

TABEL I.3
DATA IMPLEMENTASI ALOKASI ANGGARAN DAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	Realisasi Pencairan Dana

Sumber: Hasil analisis, 2016

Sementara itu tabel data yang berisi perencanaan kegiatan ditunjukkan dalam Tabel I.4. Dalam tabel tersebut dapat diketahui dasar kebijakan yang digunakan dalam perencanaan, baik perencanaan dari aspek alokasi anggaran maupun waktu pelaksanaan pada masing-masing tahun anggaran.

TABEL I.4
DATA KEBIJAKAN PERENCANAAN ALOKASI ANGGARAN DAN
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahun Anggaran	Dasar Kebijakan Bankeu Bidang Sarpras	Uraian

Sumber: Hasil analisis, 2016

Sedangkan tabel data yang berisi kebutuhan Kabupaten/Kota ditunjukkan dengan Tabel I.5. Dalam tabel tersebut dapat diketahui visi, misi serta arah pembangunan dalam RPJPD Kabupaten/Kota; program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten/Kota; serta prioritas pembangunan dalam RKPD tiap-tiap tahun.

TABEL I.5
TABEL DATA RPJPD, RPJMD DAN RKPD KABUPATEN/KOTA

No	Kab/Kota	RPJPD 2005-2025		RPJMD		RKPD		
		Visi	Misi	Tahun	Program Pembangunan	Tahun	Prioritas Pemb	Sasaran

Sumber: Hasil analisis, 2016

Instrumen tabulasi lain yang digunakan dalam penelitian ini selain tabel data adalah tabel kerja. Tabel kerja yang digunakan meliputi 2 (dua) jenis, yaitu: (1) Tabel kerja untuk menyandingkan antara perencanaan dan implementasi kegiatan, yang terbagi menjadi:

1. Aspek variabel waktu pelaksanaan;

TABEL I.6
TABEL KERJA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kab/ Kota	Nama Kegiatan	APBD Induk/ APBD Perubahan	RF	RK	RPD	Keterangan	Perencanaan		Implementasi	Sesuai/ Tidak Sesuai
								Dasar	Uraian		

Sumber: Hasil analisis, 2016

2. Aspek variabel alokasi anggaran.

TABEL I.7
TABEL KERJA ALOKASI ANGGARAN

No	Kab/ Kota	Nama Kegiatan	Perencanaan	Implementasi			Sesuai/ Tidak Sesuai
			Anggaran (Rp)	RK	RPD	Kondisi	

Sumber: Hasil analisis, 2016

(2) Tabel kerja untuk menyandingkan antara jenis dan lokasi Bantuan Sarpras dengan kebutuhan Kabupaten/Kota dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana Tabel I.8.

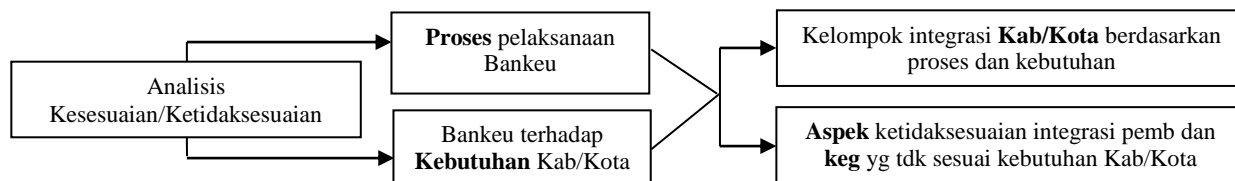
TABEL I.8
**TABEL KERJA PERSANDINGAN JENIS DAN LOKASI KEGIATAN
DENGAN RPJPD, RPJMD DAN RKPD**

Bankeu Bidang Sarpras					RPJPD			RPJMD		RKPD		
No	Kab/ Kota	Nama Kegiatan	Lokasi Keg	Jenis Sarpras	Visi	Misi	Sesuai/ Tdk Sesuai	Program Prioritas	Sesuai/ Tdk Sesuai	Program Prioritas	Sasaran	Sesuai/ Tdk Sesuai

Sumber: Hasil analisis, 2016

1.8.5.2. Teknik Analisis Data

Proses analisis yang digunakan untuk menjawab sasaran-sasaran yang ada dalam penelitian ini, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (1) Proses analisis kesesuaian/ketidaksesuaian pada proses pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana, dan (2) Proses analisis kesesuaian/ketidaksesuaian kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota. Dari kedua proses analisis tersebut, diketahui kelompok integrasi Kabupaten/Kota berdasarkan proses pelaksanaan maupun kesesuaian dengan kebutuhan Kabupaten/Kota serta aspek dan kegiatan apa saja yang tidak sesuai sebagaimana Gambar berikut ini.



Sumber: Hasil analisis, 2016

GAMBAR 1.2
DIAGRAM PROSES ANALISIS INTEGRASI PEMBANGUNAN

Teknik analisis yang digunakan pada proses analisis kesesuaian/ketidaksesuaian pada proses pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana adalah *desk analysis* sebanyak 2 tahap. Tahap pertama untuk menyelesaikan sasaran pertama yaitu mengidentifikasi kegiatan yang selesai dan tidak selesai atau tidak dapat dilaksanakan, sedangkan tahap kedua untuk menyelesaikan sasaran kedua yaitu mengidentifikasi kegiatan yang telah dan belum terintegrasi. Teknik analisis *desk analysis* juga digunakan pada proses analisis kesesuaian/ketidaksesuaian kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota. Setelah kedua proses analisis tersebut selesai dilakukan, digunakan teknik analisis diagram kuadran untuk menghasilkan kelompok integrasi Kabupaten/Kota serta kembali menggunakan *desk analysis* untuk mengetahui aspek dan kegiatan apa saja yang tidak sesuai.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam laporan ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Bab I adalah Pendahuluan, Bab II adalah Kajian Literatur, Bab III adalah Gambaran Umum, Bab IV adalah Analisis sedangkan Bab V adalah Penutup. Penjabaran mengenai masing-masing Bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang yang melandasi tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Disamping itu, turut dijelaskan pula mengenai tujuan dan sasaran penelitian; manfaat penelitian; ruang lingkup

penelitian (substansial dan spasial); keaslian penelitian; kerangka pemikiran; serta sistematika penulisan laporan.

BAB II KAJIAN LITERATUR INTEGRASI PEMBANGUNAN ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

Pada Bab ini dikemukakan kajian literatur untuk menemukan variabel yang digunakan sesuai dengan sasaran dan tujuan penelitian yaitu mengenai *Good governance*, Integrasi Pembangunan Daerah serta Implementasi Integrasi Pembangunan yang telah dilakukan di Indonesia, termasuk di dalamnya implementasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini menggambarkan secara umum profil wilayah studi meliputi aspek geografis, kependudukan dan ekonomi Provinsi Jawa Tengah; profil APBD Provinsi Jawa Tengah; gambaran proses perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; sebaran alokasi anggaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; serta gambaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011-2015.

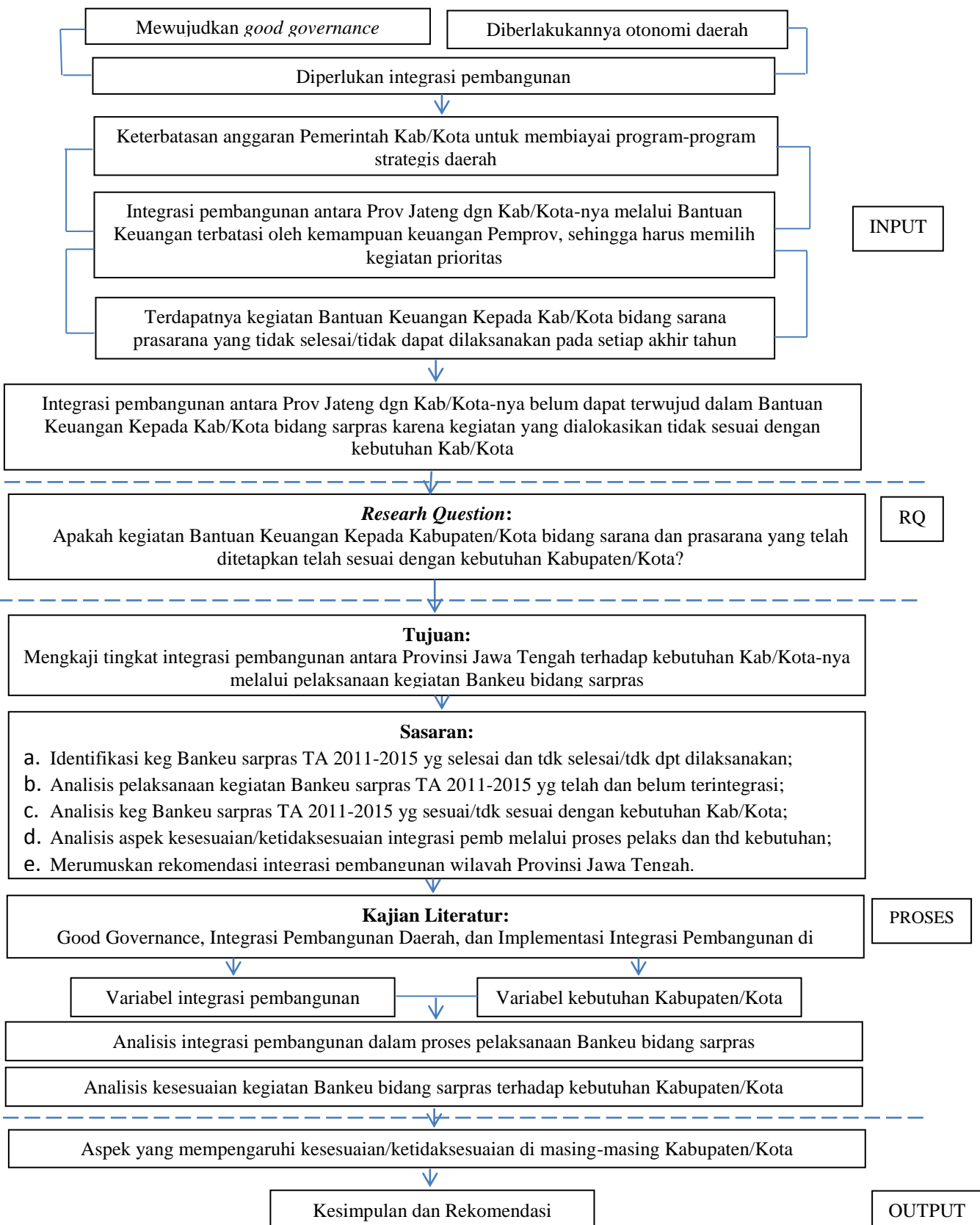
BAB IV INTEGRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN KABUPATEN/KOTA MELALUI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pada Bab ini berisi tentang proses analisis yang dilakukan beserta hasilnya. Proses analisis tersebut terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu: (1) analisis proses pelaksanaan kegiatan; (2) analisis kesesuaian/ketidaksesuaian terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota; (3) analisis proses pelaksanaan dan kesesuaian terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota; serta (4) *best practice* pelaksanaan Bantuan

Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana TA 2011-2015.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya serta tindak lanjut dari kesimpulan berupa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk integrasi pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Analisis Penulis, 2016

GAMBAR 1.3
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN